

Implementasi Teori Maslow dalam Meningkatkan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Binaan YBM PLN Di Desa Riamau

Lisa Asmira¹, Irgianto²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Papua Barat, Manokwari, Indonesia

²Pendamping Desa, Yayasan Baitul Maal PLN

Email: ¹lisaasmira10@gmail.com, ²irgiantoato29@gmail.com

Abstract

Community economic empowerment programs are an important strategy for improving the welfare of rural communities. However, their success largely depends on the motivation and participation of target beneficiaries. The Baitul Maal PLN Foundation (YBM PLN), through its Desa Cahaya Program, has implemented an economic empowerment program in Riamau Village, Wawo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. During its initial implementation, the program faced challenges due to the low participation of beneficiary communities. This study aims to analyze the implementation of Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Theory in enhancing the motivation and participation of beneficiaries in the economic empowerment program. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews, direct field involvement, and document analysis, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that fulfilling physiological and safety needs through productive business capital assistance provided the initial foundation for community motivation. This motivation gradually developed through the fulfillment of social needs within business groups, esteem needs through recognition of business performance, and self-actualization, as reflected in the emergence of local facilitators and community self-help groups. The implementation of Maslow's theory enhanced beneficiaries' motivation, sense of ownership, and active participation. However, challenges remain, including limited initial economic resources, inadequate managerial capacity, and differences in individual needs. The study recommends strengthening the role of village facilitators, improving the capacity of business groups, and utilizing local social capital to sustain community motivation and participation.

Key Words: Maslow's Hierarchy of Needs, Motivation, Community Participation, Economic Empowerment, YBM PLN

Abstrak

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh tingkat motivasi dan partisipasi masyarakat sasaran. Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) melalui Program Desa Cahaya telah mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi di Desa Riamau, Kecamatan

Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada tahap awal pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa rendahnya keterlibatan masyarakat binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan pada program pemberdayaan ekonomi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, keterlibatan langsung di lapangan, dan studi dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis dan rasa aman melalui bantuan modal usaha produktif menjadi fondasi motivasi awal masyarakat, yang kemudian berkembang melalui pemenuhan kebutuhan sosial dalam kelompok usaha, kebutuhan penghargaan melalui pengakuan atas kinerja usaha, hingga aktualisasi diri yang ditandai dengan munculnya kader lokal dan kelompok swadaya masyarakat. Implementasi teori Maslow terbukti mampu meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan partisipasi aktif masyarakat dalam program, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya ekonomi awal, rendahnya kapasitas manajerial masyarakat, dan perbedaan tingkat kebutuhan antarindividu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pendamping desa, peningkatan kapasitas kelompok usaha, dan pemanfaatan modal sosial masyarakat sebagai strategi menjaga keberlanjutan motivasi dan partisipasi dalam program pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hierarki Kebutuhan Maslow, Motivasi, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi, YBM PLN.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan. Keberhasilan sebuah program pemberdayaan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat sasaran termotivasi dan berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki potensi, kekuatan, dan kapasitas untuk berkembang secara mandiri. (Kasmawanto, 2025) Pendekatan pemberdayaan berbasis potensi lokal telah lama diakui sebagai strategi yang efektif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, karena mampu mengintegrasikan kekuatan internal komunitas dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengendalikan dan mengarahkan perubahan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, sehingga tercipta masyarakat yang dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan, mengingat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi juga menjadi pembawa perubahan kesetiap elemen kehidupan (Sujiyanto, 2024)).

Dalam praktiknya, tidak sedikit program pemberdayaan ekonomi di pedesaan yang belum mencapai hasil optimal pada tahap awal pelaksanaannya. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah rendahnya motivasi dan partisipasi masyarakat, terutama ketika kebutuhan dasar mereka belum sepenuhnya terpenuhi dan kepercayaan terhadap keberlanjutan program masih rendah. Kondisi semacam ini membuat masyarakat cenderung bersikap pasif, sekadar menjadi penerima manfaat tanpa keterlibatan yang berarti dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Pemberdayaan masyarakat tidak selalu mudah dilakukan, banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi

dari pihak luar atau kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah, selain itu, ada juga kendala internal seperti kurangnya kepercayaan diri atau ketergantungan yang tinggi pada bantuan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi pemberdayaan yang melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat, serta dukungan yang berkelanjutan dari pihak-pihak terkait, program pemberdayaan yang baik haruslah menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dalam proses pembangunan. (Sujianto, 2024)

Kajian terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat umumnya masih berhenti pada level konseptual, yaitu menjelaskan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan penting bagi keberhasilan program (Kasmawanto, 2025; Sujianto, 2024). Studi lain mengaitkan teori hierarki kebutuhan Maslow dengan konteks pendidikan dan spiritualitas keislaman (Rahmadania & Aly, 2023; Khoirul & Akbar, 2024), maupun dengan perilaku konsumen dan kinerja individu dalam organisasi bisnis (Bari, 2022; Ratnadiningrum, 2023). Secara internasional, Rojas, Méndez, dan Watkins-Fassler (2023) juga membuktikan secara empiris relevansi hierarki kebutuhan Maslow dalam konteks pembangunan (development), sementara Ihensekien dan Joel (2023) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan berjenjang tetap menjadi kerangka kuat untuk membaca kinerja dan motivasi dalam organisasi modern.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah bagaimana teori hierarki kebutuhan Maslow diimplementasikan secara operasional di dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi Islam yang dikelola oleh lembaga amal zakat korporasi, seperti Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN), dengan sasaran masyarakat pedesaan yang baru memulai proses pemberdayaan. Kajian mengenai peran YBM PLN sendiri (Sulastri dkk., 2025) masih terbatas pada gambaran umum peran kelembagaan dan belum menautkannya dengan kerangka teori motivasi. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang berupaya dijawab oleh artikel ini, yaitu bagaimana tahapan pemenuhan kebutuhan Maslow dapat menjelaskan secara bertahap proses tumbuhnya motivasi dan partisipasi masyarakat binaan pada program pemberdayaan berbasis filantropi, sekaligus memberikan kebaruan (novelty) berupa model implementasi praktis teori Maslow pada konteks manajemen program filantropi di kawasan pedesaan Indonesia.

Dalam perspektif manajemen strategik, Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) dapat dipandang bukan sekadar lembaga filantropi penyalur dana zakat dan infak, melainkan sebagai organisasi nirlaba yang menjalankan fungsi manajemen program secara terencana, mulai dari perumusan strategi pemberdayaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, hingga evaluasi capaian. Dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia (SDM), masyarakat binaan dapat diposisikan sebagai "modal manusia" (human capital) dari program pemberdayaan, sehingga motivasi dan partisipasi mereka bukan sekadar dampak sosial, melainkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang mencerminkan efektivitas manajemen program filantropi itu sendiri. Semakin tinggi motivasi dan partisipasi masyarakat binaan, semakin besar pula keberhasilan YBM PLN dalam mengelola dana zakat dan infak menjadi dampak pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan yang bersifat karitatif dan sesaat. Dengan demikian, motivasi masyarakat binaan menjadi variabel kunci yang menjembatani antara input program (bantuan modal dan pendampingan) dengan output dan outcome manajerial yang diharapkan oleh organisasi (Sulastri dkk., 2025).

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) melalui Salah satu program unggulannya, Desa Cahaya, diarahkan untuk memperkuat aspek ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat desa, termasuk di Desa Riamau, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini menyalurkan bantuan modal usaha produktif,

pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat binaan. Meski demikian, pada tahap awal pelaksanaannya, program ini juga menghadapi tantangan berupa rendahnya keterlibatan masyarakat, yang menunjukkan bahwa intervensi ekonomi semata belum cukup untuk membangkitkan partisipasi tanpa disertai pendekatan yang mampu menumbuhkan motivasi internal.

Untuk memahami fenomena tersebut, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara pemenuhan kebutuhan manusia, motivasi, dan perilaku partisipatif. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dipandang relevan karena menekankan bahwa perilaku manusia digerakkan oleh upaya memenuhi kebutuhan yang tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Berbagai kajian terbaru menegaskan bahwa teori ini tetap relevan digunakan lintas konteks, baik dalam organisasi maupun kelompok masyarakat, sebagai kerangka untuk menjelaskan sumber motivasi individu maupun kolektif (Bari, 2022). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan psikososial masyarakat mampu meningkatkan motivasi, yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya partisipasi dalam program pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan pada Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN di Desa Riamau. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian manajemen dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola program dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam lima tingkatan hierarkis, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri, di mana individu pada umumnya akan berupaya memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum terdorong untuk mengejar kebutuhan pada tingkat berikutnya. Kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia. Setelah kebutuhan dasar tersebut relatif terpenuhi, individu akan terdorong memenuhi kebutuhan rasa aman, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Pada tingkat berikutnya, kebutuhan sosial berkaitan dengan rasa memiliki, hubungan sosial, dan penerimaan dalam kelompok, yang sangat relevan dalam konteks masyarakat desa dengan ikatan komunal yang kuat. Kebutuhan penghargaan mencakup pengakuan, status, dan rasa percaya diri yang berpengaruh langsung terhadap motivasi berprestasi seseorang. Puncak dari hierarki ini adalah aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan memberikan kontribusi bermakna bagi lingkungan sekitar. Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa teori ini tetap memiliki daya jelas yang kuat untuk membaca sumber motivasi dalam berbagai setting sosial, mulai dari organisasi keagamaan, dunia pendidikan, hingga pengambilan keputusan individu (Rahmadania & Aly, 2023).

Dalam ranah keislaman, sejumlah pemikir mencoba mendialogkan hierarki kebutuhan Maslow dengan nilai-nilai spiritual, dengan berpandangan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia tidak berhenti pada aspek material semata, tetapi juga mencakup dimensi ibadah dan kesempurnaan diri (insan kamil) sebagai bentuk aktualisasi tertinggi (Khoirul & Akbar, 2024). Perspektif ini memperkaya pemahaman bahwa dalam konteks

masyarakat yang religius seperti Desa Riamau, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat pula bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial yang telah melekat dalam kehidupan komunal masyarakat setempat.

Bukti empiris internasional turut memperkuat relevansi lintas-konteks teori ini. Rojas, Méndez, dan Watkins-Fassler (2023), dalam jurnal *World Development*, menemukan bahwa struktur berjenjang kebutuhan manusia terbukti secara empiris memengaruhi kesejahteraan subjektif masyarakat di negara berkembang, sehingga relevan dijadikan kerangka analisis dalam program pembangunan dan pemberdayaan berbasis komunitas. Ihensekien dan Joel (2023) dalam *The Romanian Economic Journal* juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan berjenjang tetap menjadi determinan penting kinerja dan motivasi dalam organisasi modern, sejalan dengan temuan Rudito, Famiola, dan Anggahegari (2023) yang menunjukkan bahwa modal sosial dan pemenuhan kebutuhan komunitas berperan penting dalam keberhasilan program pemberdayaan berbasis corporate social responsibility (CSR) di negara berkembang.

Motivasi dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

Motivasi merupakan dorongan internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2019; Siagian, 2018). Robbins dan Judge (2017) menegaskan bahwa motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan, yang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebutuhan individu tersebut terpenuhi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivasi menjadi faktor penentu tingkat keterlibatan dan keberlanjutan partisipasi, yang dapat bersumber dari kebutuhan ekonomi, rasa aman, pengakuan sosial, maupun keinginan untuk berkembang.

Studi terapan pada berbagai konteks organisasi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan berjenjang, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri, berkorelasi dengan meningkatnya motivasi dan kinerja individu (Ratnadinigrum, 2023). Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa pendekatan berbasis kebutuhan penting diterapkan sebelum merancang suatu program intervensi, termasuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar program yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan riil dan aspirasi kelompok sasaran sehingga lebih mudah diterima dan dijalankan secara partisipatif

Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi, yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup partisipasi gagasan, pengambilan keputusan, dan pengawasan (Mardikanto & Soebiato, 2017). Kajian literatur sistematis terbaru mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pengelola program, manfaat yang dirasakan langsung, serta ruang keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi determinan penting tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan (Rifdah & Kusdiwanggo, 2024).

Pendekatan berbasis aset dan potensi lokal (asset-based community development) juga terbukti mampu mendorong partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan berbasis defisit, karena masyarakat dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan dan potensi, bukan sekadar sebagai penerima bantuan (Mustoip & Al Ghozali, 2022; Kusuma dkk., 2024). Tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada umumnya mencerminkan adanya motivasi, rasa memiliki, dan kepercayaan terhadap keberlanjutan program, sehingga partisipasi kerap dijadikan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan.

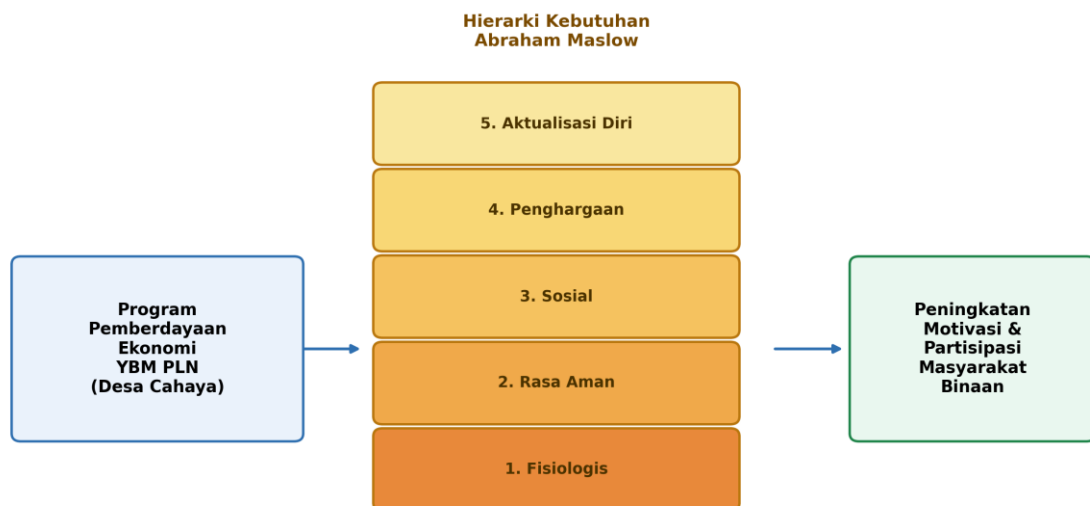
Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Filantropi dan Kawasan

Lembaga filantropi Islam seperti YBM PLN memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, dengan bentuk kegiatan yang umumnya meliputi bantuan modal usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, penguatan kelembagaan kelompok usaha, serta pendampingan berkelanjutan (Haerana dkk., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan, di mana peran pendamping desa menjadi kunci dalam memfasilitasi tumbuhnya kapasitas kolektif masyarakat (Prayitno & Subagiyo, 2018; Triatmanto & Apriyanto, 2024).

Berbagai studi pemberdayaan berbasis desa menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kelompok usaha, pendampingan berkelanjutan, dan pemanfaatan modal sosial lokal menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, baik melalui skema BUMDes (Zahrudin dkk., 2023; Sastika & Mayasiana, 2024), pengembangan produk usaha mikro berbasis digital (Rofii dkk., 2023), maupun pemanfaatan sumber daya lokal untuk kewirausahaan masyarakat (Sapthu dkk., 2024). Temuan-temuan ini memperkuat relevansi kerangka teori Maslow sebagai pisau analisis untuk membaca bagaimana tahapan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan tumbuhnya motivasi dan partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi seperti yang dijalankan YBM PLN di Desa Riamau

Kerangka Pemikiran (Conceptual Framework)

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini disusun dalam suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logis implementasi program pemberdayaan hingga terbentuknya motivasi dan partisipasi masyarakat binaan. Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN diposisikan sebagai intervensi awal yang, melalui lima tahapan hierarki kebutuhan Abraham Maslow (fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri), secara bertahap mendorong terbentuknya motivasi intrinsik yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat binaan dalam keberlanjutan program. Kerangka pemikiran tersebut divisualisasikan pada Gambar 1 berikut.



Kerangka Pemikiran: Implementasi Teori Maslow dalam Meningkatkan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Binaan YBM PLN di Desa Riamau

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Temuan ini juga sejalan dengan kajian internasional Davies, Wong, dan McCaughey (2022) dalam *Development in Practice*, yang menekankan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan berbasis komunitas sangat ditentukan oleh sejauh mana pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) masyarakat, bukan semata besarnya bantuan yang diberikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan pada Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, pengalaman, dan dinamika sosial masyarakat secara kontekstual, yang sulit terekam melalui pendekatan kuantitatif semata (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Desa Riamau, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu lokasi Program Desa Cahaya YBM PLN. Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan jumlah total 5 (lima) orang, terdiri atas seorang pendamping Desa Cahaya dan 4 (empat) orang masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Kriteria inklusi bagi informan masyarakat binaan meliputi: (1) telah menjadi peserta binaan Program Desa Cahaya YBM PLN minimal selama 1 (satu) tahun; (2) aktif terlibat dalam minimal satu kelompok usaha binaan; dan (3) bersedia diwawancarai secara mendalam dan memberikan informasi secara terbuka mengenai pengalamannya selama mengikuti program. Sementara itu, kriteria inklusi bagi informan pendamping desa meliputi keterlibatan langsung dan berkelanjutan dalam pendampingan Program Desa Cahaya di Desa Riamau sejak tahap awal pelaksanaan program. Pemilihan kedua kelompok informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki keterlibatan dan pengetahuan langsung mengenai proses implementasi program di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara, yaitu: (1) observasi lapangan terhadap aktivitas dan interaksi masyarakat dalam kegiatan program; (2) wawancara mendalam dengan pendamping desa dan masyarakat binaan; (3) keterlibatan langsung peneliti dalam sejumlah kegiatan program; dan (4) studi dokumentasi terhadap laporan, arsip, dan pedoman program yang relevan. Kombinasi teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus memungkinkan triangulasi sumber guna meningkatkan kredibilitas temuan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2022). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi berdasarkan lima tingkatan kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pemenuhan setiap tingkat kebutuhan berkontribusi terhadap motivasi dan partisipasi masyarakat, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan mengenai relevansi teori Maslow dalam konteks program pemberdayaan ekonomi YBM PLN di Desa Riamau. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara antarinforman serta mengonfirmasi data wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi program.

Secara teknis, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara ketua/pengurus kelompok usaha binaan dengan anggota kelompok pada kelompok usaha yang sama, guna melihat konsistensi informasi mengenai proses dan dampak program. Hasil wawancara tersebut kemudian dikonfirmasi silang (*cross-check*) dengan

hasil observasi langsung peneliti di lapangan serta dicocokkan dengan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan kelompok usaha, catatan pendampingan, dan data perkembangan usaha binaan yang dimiliki oleh pendamping Desa Cahaya. Apabila ditemukan perbedaan informasi antarsumber, peneliti melakukan klarifikasi lanjutan kepada informan terkait untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data sebelum data tersebut diinterpretasikan lebih lanjut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Teori Hierarki Abraham Maslow dalam Meningkatkan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Binaan YBM PLN di Desa Riamau

Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis dan Rasa Aman Sebagai Sumber Motivasi Awal

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN di Desa Riamau diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui bantuan modal usaha produktif dan pendampingan ekonomi. Bantuan tersebut memungkinkan masyarakat binaan memperoleh penghasilan tambahan yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini sejalan dengan pandangan bahwa program pemberdayaan yang efektif harus berangkat dari pemenuhan kebutuhan riil masyarakat sebagai fondasi sebelum menyentuh aspek psikososial yang lebih tinggi (Mardikanto & Soebiato, 2017; Hasibuan, 2019).

“Awalnya masyarakat di sini ragu, karena program-program sebelumnya sering hanya janji. Begitu bantuan modal usaha benar-benar cair dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, mereka baru percaya program ini serius membantu mereka.”

Irgianto, Wawancara, 2025

Masyarakat yang pada awalnya bersikap pasif dan ragu terhadap program, berangsur-angsur menunjukkan minat untuk mengikuti pembinaan dan kegiatan kelompok usaha (Irgianto, Wawancara, 2025). Pola ini memperkuat temuan bahwa motivasi kerja maupun motivasi berpartisipasi cenderung meningkat seiring terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan rasa aman individu (Ratnadiningrum, 2023).

“Yang tadinya cuma datang kalau dipanggil secara khusus oleh pendamping desa, lama-lama mereka mulai datang sendiri ke pertemuan kelompok. Itu tanda kepercayaan mereka terhadap program mulai tumbuh.”

Irgianto, Wawancara, 2025

Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menumbuhkan rasa aman secara ekonomi dan secara bertahap meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program. Rasa aman inilah yang tampak menjadi motivasi awal yang mendorong masyarakat binaan untuk mulai terlibat secara aktif dalam kegiatan program.

Temuan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis dan rasa aman menjadi fondasi motivasi awal masyarakat binaan pada dasarnya mendukung proposisi dasar teori Maslow maupun temuan Ratnadiningrum (2023) dan Mardikanto & Soebiato (2017) bahwa program intervensi perlu berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, temuan ini juga memberikan modifikasi kontekstual terhadap teori Maslow yang bersifat universal: pada masyarakat Desa Riamau, rasa aman yang dimaksud tidak murni bersifat ekonomi personal, tetapi juga bercampur dengan rasa aman kolektif berbasis kepercayaan terhadap institusi (trust in institution), yaitu keyakinan bahwa YBM PLN akan konsisten mendampingi program hingga tuntas. Dimensi kepercayaan institusional ini belum banyak disinggung dalam teori Maslow klasik maupun kajian Ratnadiningrum (2023) yang lebih berfokus pada konteks organisasi formal, sehingga menjadi salah satu kontribusi kontekstual penelitian ini.

Pemenuhan Kebutuhan Sosial dalam Membangun Motivasi Kolektif

Program pemberdayaan ekonomi YBM PLN di Desa Riamau dilaksanakan melalui pendekatan kelompok, seperti kelompok usaha Cahaya dan kajian rembuk warga

“YBM PLN melalui pendamping desa cahaya tidak hanya memberikan kita bantuan modal usaha tetapi juga memberikan kita penampungan terus menerus, kita di arahkan untuk aktif terlibat dalam kelompok binaan, ikut kajian rutin”

-Ishaka, Wawancara, 2025.

Pendekatan berbasis kelompok ini mendorong interaksi sosial, kerja sama, dan solidaritas antaranggota masyarakat binaan, sehingga kebutuhan sosial berupa rasa memiliki dan rasa diterima dalam kelompok dapat terpenuhi melalui kegiatan-kegiatan bersama tersebut (Irgianto, Wawancara, 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan partisipatif berbasis kelompok menghasilkan solusi yang lebih relevan dengan konteks lokal karena masyarakat dilibatkan secara aktif sejak proses identifikasi kebutuhan (Kusuma dkk., 2024; Mustoip & Al Ghozali, 2022).

“Kami tergabung dalam kelompok usaha supaya masyarakat tidak jalan sendiri-sendiri. Di situ mereka saling bantu, saling mengingatkan, dan merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari usaha pribadi mereka.”

Kalisom, Wawancara, 2025

Motivasi masyarakat binaan pada tahap ini tidak lagi bersifat individual semata, tetapi berkembang menjadi motivasi kolektif untuk memajukan kelompok usaha dan desa secara bersama-sama. Kondisi ini pada gilirannya memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program, karena keberhasilan program mulai dipersepsikan sebagai keberhasilan bersama, bukan semata keberhasilan individu penerima manfaat.

Temuan mengenai peran kelompok usaha dan rembuk warga dalam memenuhi kebutuhan sosial memperkuat pandangan Kusuma dkk. (2024) dan Mustoip & Al Ghozali (2022) bahwa pendekatan partisipatif berbasis kelompok mempercepat tumbuhnya rasa memiliki. Berbeda dengan konteks organisasi formal yang menjadi fokus Robbins & Judge (2017), kebutuhan sosial pada masyarakat Desa Riamau tumbuh di atas modal sosial komunal yang telah ada sebelumnya (ikatan kekerabatan dan ketetanggaan), sehingga proses pemenuhan kebutuhan sosial melalui program relatif lebih cepat terbentuk dibandingkan pada konteks organisasi modern yang cenderung individualistik. Temuan ini memodifikasi asumsi bahwa kebutuhan sosial selalu terbentuk secara bertahap dan lambat; dalam konteks komunitas dengan modal sosial kuat, kebutuhan sosial justru dapat menjadi akselerator, bukan sekadar prasyarat, bagi tumbuhnya motivasi kolektif.

Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan dan Peningkatan Motivasi Berprestasi

Penghargaan terhadap keberhasilan masyarakat binaan, baik melalui pengakuan verbal dari pendamping desa, pemberian kepercayaan dalam pengelolaan usaha, maupun peningkatan peran dalam kelompok, memberikan dampak positif terhadap rasa percaya diri masyarakat. Dalam praktiknya, YBM PLN memberikan tambahan modal pengembangan usaha kepada binaan yang menunjukkan tingkat keaktifan baik serta mampu menunjukkan progres perkembangan usaha yang positif (Irgianto, Wawancara, 2025). Skema penghargaan berbasis kinerja semacam ini konsisten dengan temuan bahwa pemenuhan kebutuhan penghargaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi berprestasi dan kinerja individu dalam suatu organisasi maupun kelompok usaha (Ratnadiningrum, 2023; Robbins & Judge, 2017).

“Binaan yang aktif dan usahanya menunjukkan perkembangan, YBM PLN berikan tambahan modal sebagai bentuk apresiasi dan untuk mengembangkan usaha binaan agar lebih baik kedepannya. langkah ini membuktikan bahwa YBM PLN tidak akan pernah membiarkan binaannya berjuang sendiri tetapi akan selalu hadir kebersamai proses tumbuh dari para penerima manfaat.”
Irgianto, Wawancara, 2025

Dengan terpenuhinya kebutuhan penghargaan tersebut, masyarakat binaan merasa dihargai dan diakui kontribusinya, sehingga termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja usaha dan berpartisipasi lebih aktif dalam program

“Alhamdulillah saya bersyukur atas segala bantuan dan dukungan dari YBM PLN, Karena saya sendiri sudah beberapa kali di berikan bantuan yang awalnya hanya bantuan untuk jual kue, kemudian di buat kios jualan, kemudian di berikan bantuan modal untuk jualan di pasar Ramadhan, bukan cuma itu saya juga sudah memiliki produk sendiri yaitu keripik keladi dan sudah ber izin, itu semua adalah bantuan dari YBM PLN”

Erni, Wawancara, 2025

Pola ini juga mendorong munculnya motivasi berprestasi dan kepemimpinan lokal di kalangan binaan, yang kemudian menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan program pemberdayaan di Desa Riamau.

“Sejak usaha saya diakui dan dipercaya mengelola sendiri, saya jadi lebih semangat. Saya merasa bukan cuma penerima bantuan, tapi juga dianggap mampu.”

Saali, Wawancara, 2025

Pola penghargaan berbasis kinerja yang diterapkan YBM PLN konsisten dengan temuan Ratnadinigrum (2023) dan Robbins & Judge (2017) bahwa pengakuan atas kinerja meningkatkan motivasi berprestasi individu. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa bentuk penghargaan yang paling bermakna bagi masyarakat binaan bukan semata insentif material (tambahan modal), melainkan pengakuan sosial dan kepercayaan untuk mengelola usaha secara mandiri, sebagaimana diungkapkan oleh informan Erni. Temuan ini memberi nuansa tambahan terhadap teori Maslow, bahwa pada masyarakat dengan latar belakang ekonomi terbatas, kebutuhan penghargaan (esteem needs) dapat terpenuhi secara bersamaan dengan kebutuhan rasa aman ekonomi, alih-alih murni muncul setelah kebutuhan yang lebih rendah sepenuhnya tuntas terpenuhi sebagaimana diasumsikan dalam model hierarkis yang kaku.

Aktualisasi Diri Sebagai Puncak Motivasi dan Partisipasi

Pada tahap aktualisasi diri, Program Desa Cahaya YBM PLN memberikan ruang bagi masyarakat binaan untuk tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak dan inovator dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi

“Kita memberikan ruang kepada para penerima manfaat untuk mengaktualisasikan diri dalam memajukan usahanya, misal di awal kita selalu damping Ketika menjual produknya ke kota, sekarang mereka menjual secara mandiri”

Irgianto, wawancara, 2025

Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat mampu mengembangkan ide usahanya, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran secara mandiri. Partisipasi pada tahap ini bersifat inisiatif dan berkelanjutan,

menandakan bahwa motivasi intrinsik masyarakat binaan telah terbentuk secara kuat, sejalan dengan konsep aktualisasi diri sebagai puncak hierarki kebutuhan Maslow (Khoirul & Akbar, 2024).

“Sekarang binaan sudah memiliki kelompok swadaya masyarakat yang aktif dalam mendampingi para binaan lainnya, ada beberapa binaan yang sudah bisa mendampingi binaan baru, bahkan mengembangkan produk sendiri. Mereka sudah jadi penggerak, bukan lagi sekadar penerima program.”
Irgianto, Wawancara, 2025

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program ini telah melahirkan sejumlah kader lokal potensial di Desa Riamau, yang didukung dengan terbentuknya kelompok swadaya masyarakat sebagai wadah aktualisasi diri bagi anggotanya. Kemunculan kader dan kelompok swadaya ini menegaskan relevansi teori Maslow dalam menjelaskan bagaimana peningkatan motivasi secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri, berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi.

“Alhamdulillah sekarang kita punya Kelompok swadaya masyarakat jadi kita punya wadah untuk bergerak demi kemajuan desa dan melalui wadah ini kita bisa memperhatikan masyarakat sekitar kita, seperti kita salurkan info ke masyarakat sekitar”

Ishaka, wawancara, 2025

Munculnya kader lokal dan kelompok swadaya masyarakat sebagai wujud aktualisasi diri sejalan dengan konsep puncak hierarki kebutuhan Maslow serta perspektif Khoirul & Akbar (2024) mengenai aktualisasi diri dalam bingkai nilai keislaman. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa aktualisasi diri pada konteks pemberdayaan berbasis filantropi tidak selalu bersifat individual sebagaimana konsep asli Maslow, melainkan cenderung bersifat kolektif dan berorientasi pada keberlanjutan komunitas, misalnya melalui peran binaan sebagai fasilitator bagi binaan lain. Temuan ini memperkuat argumen Rojas dkk. (2023) bahwa penerapan teori Maslow pada konteks pembangunan (development) perlu mempertimbangkan dimensi kolektivitas budaya lokal, bukan sekadar replikasi murni dari model individualistis aslinya.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan YBM PLN di Desa Riamau tidak lepas dari sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya ekonomi pada tahap awal, rendahnya kapasitas manajerial sebagian masyarakat binaan, serta perbedaan tingkat kebutuhan dan motivasi antarindividu. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan eksternal berpotensi menghambat terbentuknya motivasi intrinsik apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang tepat dan berkelanjutan. Tantangan semacam ini juga banyak ditemukan pada program pemberdayaan berbasis komunitas lain, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok (Zahrudin dkk., 2023).

“Tantangan kami adalah supaya bantuan ini tidak membuat masyarakat jadi bergantung terus pada YBM PLN. Makanya pendampingan harus konsisten, agar motivasi mereka tumbuh dari dalam, bukan sekadar karena ada bantuan.”
Irgianto, Wawancara, 2025

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang besar dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat ke depan, terutama melalui penguatan peran pendamping desa, peningkatan kapasitas kelompok usaha dan kader lokal, serta pemanfaatan modal sosial yang telah terbentuk di masyarakat. Dukungan kelembagaan YBM PLN, pendekatan partisipatif, dan strategi pemberdayaan berbasis kebutuhan membuka ruang bagi tumbuhnya motivasi yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat dalam jangka Panjang (irgianto, wawancara, 2025) sebagaimana juga ditunjukkan oleh berbagai program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kewirausahaan desa lainnya (Triatmanto & Apriyanto, 2024; Sapthu dkk., 2024; Sastika & Mayasiana, 2024).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keberlanjutan proses pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, peluang yang dimiliki melalui dukungan kelembagaan, pendekatan partisipatif, dan pemanfaatan modal sosial menjadi modal penting dalam mendorong tumbuhnya motivasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi Manajerial

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi manajerial bagi pengelola Program Desa Cahaya YBM PLN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, manajemen YBM PLN disarankan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pendampingan berbasis tahapan kebutuhan Maslow, sehingga setiap tahap program (penyaluran modal, pembentukan kelompok usaha, pemberian penghargaan, hingga penguatan kader lokal) memiliki indikator keberhasilan (KPI) yang terukur dan selaras dengan tahapan motivasi masyarakat binaan. Kedua, pendamping desa perlu dibekali kemampuan diagnostik sederhana untuk mengenali pada tahap kebutuhan mana seorang binaan berada, sehingga intervensi pendampingan dapat lebih tepat sasaran dan tidak bersifat seragam (one-size-fits-all).

Ketiga, mengingat motivasi dan partisipasi masyarakat binaan berfungsi sebagai indikator kinerja utama keberhasilan manajemen program filantropi, YBM PLN disarankan mengintegrasikan pengukuran motivasi (misalnya melalui survei sederhana atau catatan pendampingan berkala) ke dalam sistem evaluasi program secara rutin, tidak hanya mengukur keberhasilan program dari sisi penyaluran dana atau jumlah penerima manfaat. Dengan demikian, SOP pendampingan berbasis kebutuhan ini diharapkan dapat direplikasi pada program pemberdayaan YBM PLN di desa binaan lainnya, sekaligus menjadi rujukan manajerial bagi lembaga filantropi sejenis dalam mendesain program yang berorientasi pada keberlanjutan motivasi dan partisipasi masyarakat.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terbukti relevan dan efektif dalam menjelaskan serta mendorong peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan pada Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN di Desa Riamau. Pemenuhan kebutuhan fisiologis dan rasa aman melalui bantuan modal usaha produktif menjadi fondasi awal yang menumbuhkan kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk mulai terlibat dalam program. Motivasi tersebut kemudian berkembang melalui pemenuhan kebutuhan sosial dalam kelompok usaha, pemenuhan kebutuhan penghargaan melalui pengakuan dan kepercayaan atas kinerja usaha, hingga akhirnya bermuara pada aktualisasi diri, yang ditandai dengan munculnya kader lokal dan kelompok swadaya masyarakat sebagai penggerak program secara mandiri.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi program tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya ekonomi awal, rendahnya kapasitas manajerial sebagian masyarakat, serta perbedaan tingkat kebutuhan dan motivasi antarindividu binaan.

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi peluang besar untuk terus meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat ke depan, terutama melalui penguatan peran pendamping desa, peningkatan kapasitas kelompok usaha dan kader lokal, serta pemanfaatan modal sosial yang telah terbentuk di tengah masyarakat. Dukungan kelembagaan YBM PLN, pendekatan partisipatif, dan strategi pemberdayaan berbasis kebutuhan menjadi kunci penting bagi keberlanjutan motivasi dan partisipasi masyarakat binaan dalam jangka Panjang.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, Penyelenggara Program Pemberdayaan Ekonomi YBM PLN disarankan untuk terus menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tetap memperhatikan bahwa tingkat kebutuhan dan motivasi setiap individu binaan dapat berbeda-beda

Kedua, pendampingan yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam penguatan kapasitas manajerial dan kelembagaan kelompok usaha, agar ketergantungan masyarakat binaan terhadap bantuan eksternal dapat berangsur digantikan oleh motivasi intrinsik dan kemandirian usaha

Ketiga, YBM PLN dan pendamping desa disarankan untuk memberi ruang aktualisasi diri yang lebih luas bagi masyarakat binaan, misalnya melalui penguatan kelompok swadaya masyarakat, pengembangan kader lokal, serta pelibatan binaan sebagai fasilitator atau mentor bagi kelompok usaha lain, sehingga motivasi dan partisipasi yang telah terbentuk dapat terus terjaga dan menular kepada anggota masyarakat lainnya

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih terukur kontribusi masing-masing tingkat kebutuhan Maslow terhadap motivasi dan partisipasi masyarakat, serta memperluas cakupan lokasi penelitian pada desa binaan YBM PLN lainnya agar temuan dapat digeneralisasi secara lebih luas.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Bari. (2022). *Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget*. Motivasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis.
- Davies, R., Wong, S., & McCaughey, C. (2022). Participatory development and community empowerment: Lessons from practice. *Development in Practice*, 32(7), 865–878.
- Haerana, Damayanti, E., dkk. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihensekien, O. A., & Joel, A. C. (2023). Abraham Maslow's hierarchy of needs and Frederick Herzberg's two-factor motivation theories: Implications for organizational performance. *The Romanian Economic Journal*, 85(1), 133–146.

- Kasmawanto, Z., (2025). *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Mandiri*. Jurnal Politik dan sosial kemasyarakatan. 17 (2). 227
- Khoirul, & Akbar. (2024). *Islamisasi Teori Kebutuhan Abraham Maslow*. Jurnal Dirosat, 9(1).
- Kusuma, P. N., Salsabila, A. P., Wasir, R., & Istanti, N. D. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 6352–6359.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustoip, S., & Al Ghozali, M. I. (2022). *Mewujudkan Potensi Desa Gintungranjeng melalui Pendekatan Asset-Based Community Development*. Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat, 1(2), 44–55.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahmadania, A., & Aly, H. N. (2023). *Implementasi Teori Hirarchy of Needs Maslow dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Yayasan Cahaya Generasi Islam Kota Bengkulu*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(4).
- Ratnadinigrum, N. A. A. (2023). *Motivasi Kerja Menurut Teori Maslow Bagian Staf Manajemen Project pada PT Putera Instrumenindo*. Jurnal Mahasiswa Bina Insani, 7(2), 169–178.
- Rifdah, B. N., & Kusdiwanggo, S. (2024). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis*. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 13(2), 75–85.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Boston: Pearson Education.
- Rofii, A., Budiman, I. A., Sudirno, D., & Nahdi, D. S. (2023). *Inovasi Produk Olahan Lele (OLELE) untuk Meningkatkan Pemberdayaan UMKM melalui Konten Digital di Desa Duku Tengah Kabupaten Tegal*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(4), 3185–3192.
- Rojas, M., Méndez, A., & Watkins-Fassler, K. (2023). The hierarchy of needs empirical examination of Maslow's theory and lessons for development. *World Development*, 165, 106185.
- Rudito, B., Famiola, M., & Anggahegari, P. (2023). Corporate social responsibility and social capital: Journey of community engagement toward community empowerment program in developing country. *Sustainability*, 15(1), 466.
- Sapthu, A., Louhenapessy, D., Duwila, U., Liur, L., Sangur, K., Ramly, A., & Laitupa, A. (2024). *Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Pemanfaatan Daur Ulang Sampah di Desa Mamala*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 4279–4284.

- Sastika, H. A., & Mayasiana, N. A. (2024). *Village Government Strategy in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprise Program*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(2).
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai*. jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara. 5(4)
- Sulastri. S, Sarbini, A. Herdiana, D. (2025). *Peran yayasan baitul mal PLN dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 10(2)
- Triatmanto, B., & Apriyanto, G. (2024). *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Malang: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zahrudin, A., Hariyono, R. C. S., Syifa, F. F., Al Syarief, S. W., & Asfahani, A. (2023). *Pemberdayaan Program Pelatihan Bumdes dalam Mengembangkan Perekonomian Desa*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 7771–7778.